

## Chapter 1 : HS Code List of Indonesia | Harmonized System Code | HS Classification

*Search BTKI HS code list Indonesia for chapter 1 to Lookup Indonesian customs tariff code or harmonized system code.*

Structure[ edit ] The HS is organized logically by economic activity or component material. For example, animals and animal products are found in one section of the HS, while machinery and mechanical appliances are found in another. The HS is organized into 21 sections, which are subdivided into 97 chapters. The 97 HS chapters are further subdivided into approximately 5, headings and subheadings. Section and Chapter titles describe broad categories of goods, while headings and subheadings describe products in more detail. Natural commodities, such as live animals and vegetables, for example, are described in the early sections of the HS, whereas more evolved goods such as machinery and precision instruments are described in later sections. Chapters within the individual sections are also usually organized in order of complexity or degree of manufacture. For example, within Section X Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; Recovered waste and scrap paper or paperboard; Paper and paperboard and articles thereof , Chapter 47 provides for pulp of wood or of other fibrous cellulosic materials, whereas Chapter 49 covers printed books, newspapers, and other printed matter. Finally, the headings within individual Chapters follow a similar order. The HS code consists of 6-digits. The first two digits designate the HS Chapter. The second two digits designate the HS heading. The third two digits designate the HS subheading. Example of the hierarchical structure of the Harmonized System In addition to the HS codes and commodity descriptions, each Section and Chapter of the HS is prefaced by Legal Notes, which are designed to clarify the proper classification of goods. To ensure harmonization, the contracting parties to the Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, have agreed to base their national tariff schedules on the HS nomenclature and Legal Notes. Parties are permitted to subdivide the HS nomenclature beyond 6-digits and add their own Legal Notes according to their own tariff and statistical requirements. Parties often set their customs duties at the 8-digit "tariff code" level. Statistical suffixes are often added to the 8-digit tariff code for a total of 10 digits. HS Chapter 77 is reserved for common use by the parties internationally. Chapters 98 and 99 are reserved for national use. Since its creation, the HS has undergone several revisions - ostensibly, to either eliminate headings and subheadings describing commodities that are no longer traded, or to create headings and subheadings that address technological advancements and environmental concerns. The current version of the HS became effective on January 1, An example of a product classified according to its form would be whole potatoes. The classification will also change depending on whether the potatoes are fresh or frozen. Fresh potatoes are classified in position An example of a product classified according its material composition is a picture frame. Picture frames made of wood are classified under subheading Picture frames made of plastic are classified under subheading Picture frames made of glass are classified under subheading An example of a product classified according to its form is personal hygiene soap. When in the form of a bar, cake or moulded shape, such soap is classified under subheading For toilet use including medicated products. Conversely, liquid personal hygiene soap is classified under either An example of a product classified according to its function is a carbon monoxide CO detector. If the CO detector captures and displays gas measurements, then it is properly classified under subheading Gas or smoke analysis apparatus. If the CO detector does not capture and display gas measurements, then it is properly classified under subheading Burglar or fire alarms and similar apparatus. Although every product and every part of every product is classifiable in the HS, very few are explicitly described in the HS nomenclature. Any product for which there is no explicit description can be classified under a "residual" or "basket" heading or subheading, which provide for Other goods. Residual codes normally occur last in numerical order under their related headings and subheadings. An example of a product classified under a residual heading is a live dog, which must be classified under heading Applications[ edit ] As of , there were countries or territories applying the Harmonized System worldwide, [2] HS code are used by Customs authorities, statistical agencies, and other government regulatory bodies, to monitor and control the import and export of commodities through:

## Chapter 2 : Search HS Code Page

*In Indonesia, this code known as a BTKI code (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). HS codes are categorized into twenty-one sections all around the world which are split into 99 chapters. Basically, HS commodity code is classified into 2 digits, 4 digits, and 8 digits.*

World Customs Organization WCO , adalah organisasi kepabeanan dunia yang mengatur dan menerapkan perjanjian multilateral di bidang kepabeanan. Perubahan editorial, Perubahan catatan-catatan pada HS, Penambahan pos tariff baru, Penghapusan pos tariff, Penggabungan pos tariff, Pemecahan pos tarif. Perubahan tersebut tidak lain merupakan review 5 tahunan sekali untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan trend perdagangan dunia, mengingat barang yang diperdagangkan selalu berubah sesuai perkembangan. Sehingga apabila diperlukan, maka akan direvisi terhadap klasifikasi barang dalam pos tarif Harmonize System " HS. Perubahan sistem klasifikasi barang yang dilakukan Indonesia sebagai respon terhadap adanya HS dan AHTN pada dasarnya tidak merubah pembebanan tarif bea masuk. Namun demikian tidak terhindarkan adanya penyesuaian tarif bea masuk. Penyesuaian tarif bea masuk tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Perubahan sistem klasifikasi meliputi: Penambahan pos tarif baru, terhadap pos tarif baru dalam HS , tarif bea masuknya akan diusulkan oleh instansi pembina sektornya. Pemecahan pos tarif, tarif bea masuk untuk pos tarif HS yang merupakan pemecahan dari HS akan mengikuti tarif bea masuk pos tarif induknya HS Penggabungan pos tarif, beberapa pos tarif HS yang merupakan penggabungan dari dua atau lebih pos tarif HS yang tingkat tarif bea masuknya berbeda, harus dipilih tingkat tarif yang akan berlaku apakah tarif yang terendah atau tertinggi sesuai kesepakatan dengan pembina sektor. Evaluasi Peraturan Menteri Keuangan Pada tahun , dalam rangka mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan dan dalam rangka meningkatkan daya saing industri tertentu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut: Penurunan tarif dalam PMK ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember dan akan dievaluasi pelaksanaannya menjelang berakhir masa berlakunya. Penurunan tarif produk kapal dan produk barang modal industri tertentu sebanyak 25 pos tarif hanya berlaku sampai dengan 31 Desember dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Untuk menampung usulan penyesuaian tarif bea masuk yang bukan merupakan bagian dari perubahan sistem klasifikasi barang. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan. BTKI tidak hanya digunakan sebagai referensi besaran tarif bea masuk, namun juga digunakan sebagai buku referensi penomoran klasifikasi barang sehingga BTKI dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mencantumkan klasifikasi termasuk diantaranya sebagai referensi dalam penetapan bea keluar. Keterangan masing-masing kolom adalah sebagai berikut: Uraian barang dalam 4 empat dan 6 enam digit pertama berasal dari teks Harmonized System HS ; Uraian barang dalam 8 delapan digit pertama berasal dari teks AHTN; Uraian barang dalam 10 sepuluh digit merupakan uraian pos tarif nasional, kecuali: Jika terdapat perbedaan penafsiran antara uraian barang dalam kolom kedua dan kolom ketiga, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: Uraian barang dalam 4 empat dan 6 enam digit pertama merupakan uraian barang dari teks Harmonized System HS sehingga yang mengikat adalah uraian barang dalam bahasa Inggris di kolom ketiga teks aslinya ; Uraian barang dalam 8 delapan digit pertama merupakan uraian barang dari teks AHTN sehingga yang mengikat adalah uraian barang dalam bahasa Inggris di kolom ketiga teks aslinya ; Uraian barang dalam 10 sepuluh digit merupakan uraian pos tarif nasional sehingga yang mengikat adalah uraian dalam bahasa Indonesia di kolom kedua, kecuali: Besarnya pembebanan tarif dan jenis barang yang dikenakan Bea Keluar diatur lebih lanjut dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Penyusunan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-undang Kepabeanan Indonesia Nomor 10 tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun , penetapan klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan pada Harmonized System yang dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang kita

kenal dengan sebutan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Nomenklatur klasifikasi yang disusun oleh WCO terdiri dari 6 digit kode numerik yang terdiri dari 97 bab. Untuk memastikan terjadinya harmonisasi klasifikasi, pihak kontraktor Contracting Party harus menggunakan 6-digit kode numerik tersebut, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dan catatan dari Bab 1 s. Sistem klasifikasi dalam HS yang terdiri dari 6 digit tersebut dapat diperluas untuk mengadopsi subkategori tambahan oleh masing-masing negara penggunaannya. Sistem klasifikasi itu sendiri bersifat dinamis dan terus dilakukan perubahan untuk mengantisipasi baik perubahan pola perdagangan maupun perubahan lainnya. Secara berkala, WCO akan melakukan perbaikan terhadap sistem klasifikasinya tersebut. Dalam penyusunan AHTN tersebut, Indonesia telah mengusulkan berbagai produk untuk dimasukkan dalam AHTN antara lain batik, rotan, permen lunak, rumput laut, televisi, produk baja, mobil listrik, solar cell dan beberapa produk lainnya. Penambahan pos tarif baru.

### Chapter 3 : Harmonized System Codes (HS Code) Commodity Classification - Foreign Trade Online

*Admin Dashboard Template. Indonesia National Trade Repository INTR.*

### Chapter 4 : Directorate General for National Export Development

*List of HS codes in Indonesia, Harmonized System codes in Indonesia, import export HS classification, products code, tariff code at calendrierdelascience.com*

### Chapter 5 : Indonesia Import Data | Indonesia Trade Data | Indonesia Import Statistics

*HS tariff codes for Indonesia for countries including duty rates, sales tax rates, any additional taxes and import restrictions.*

### Chapter 6 : Cara Mudah Cek HS Code Online | Niswiyana's Blog

*HS Code Description MFN rate and subsequent years FTA Outcome*

### Chapter 7 : BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (BTKI) â€œ Free On Board

*Browse HS Code - Tarif Bea Masuk HS Code Uraian Bahasa Indonesia Description in English Submit Clear Silahkan lakukan pencarian Tarif Bea Masuk dengan menggunakan form di atas.*

### Chapter 8 : HS Code search engine HTS tariff classification hs codes

*Competitive hs code list products from various hs code list manufacturers and hs code list suppliers are listed above, please select quality and cheap items for you.*

### Chapter 9 : HS CODE (BARU) | Niswiyana's Blog

*Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun telah meratifikasi penggunaan HS Code yang diterbitkan oleh The World Customs Organization (WCO), sehingga dalam hal terjadi perubahan atau amandemen terhadap HS Code yang dilakukan oleh WCO, maka Indonesia juga terikat pada ketentuan tersebut.*